

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 1 ayat 1, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 3 tentang sistem pendidikan nasional juga menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut diperlukan proses pembelajaran yang efektif. Permendikbud Nomor 65

Tahun 2013 menegaskan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Sehingga setiap satuan pendidikan perlu melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian tujuan pembelajaran.

Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan kompetensi yang akan dicapai. Permendiknas Nomor 22 tahun 2016 tentang standar isi berisi standar kompetensi yang termuat dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. PPKn bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut : 1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; 2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas

dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi; 3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya; 4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (BSNP, 2006:108).

Menurut BSNP, ruang lingkup mata pelajaran PPKn pada satuan pendidikan SD/MI meliputi meliputi aspek-aspek sebagai berikut; 1) Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan; 2) Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistem hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional; 3) Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM; 4) Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, Persamaan kedudukan warga negara; 5) Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi-

konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara dengan konstitusi; 6) Kekuasaan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi; 7) Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka; 8) Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi (BSNP, 2006:108-109).

Tujuan dan ruang lingkup PPKn yang dirumuskan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan sudah sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ada dalam UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003, dimana tujuan tersebut disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan secara global. Namun dalam kenyataannya hasil belajar PPKn di Indonesia masih rendah. Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan International Civic and Citizenship Studies (ICCS) pada tahun 2009 dimana, Indonesia merupakan salah satu dari 38 negara yang ikut terlibat dan menjadi sampel dalam penelitian ICCS. Hasil penelitiannya ICCS melaporkan bahwa pengetahuan PPKn siswa kelas VIII di Indonesia berada pada peringkat 36 dari 38 negara, dengan jumlah skor 433. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan Pendidikan Kewarganegaraan siswa di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-

negara lainnya. Begitupun telah mewakili permasalahan mata pelajaran PPKn secara umum termasuk jenjang sekolah dasar.

Permasalahan juga masih terjadi disekitar kita, dibuktikan berdasarkan hasil dokumentasi dan observasi data permasalahan hasil belajar UAS PPKn siswa kelas IV semester 2 tahun ajaran 2017/2018 di beberapa sekolah diantaranya SDN 1 Jepang diperoleh dari 16 siswa, hanya 7 siswa (44%) yang memperoleh nilai diatas KKM, sedangkan 9 siswa (56%) belum mencapai KKM. Demikian juga ditunjukkan data SDN 2 Payaman diperoleh dari 28 siswa, hanya 13 siswa (47%) yang memperoleh nilai diatas KKM, sedangkan 15 siswa (53%) belum mencapai KKM. Begitu pula terjadi di SDN 5 Jepang, diperoleh dari 40 siswa, hanya 17 siswa (43%) yang sudah memperoleh nilai diatas KKM, dan lainnya 23 siswa (57%) belum mencapai KKM.

Permasalahan yang muncul dalam pembelajarann PPKn khususnya kurikulum 2013 ini, diperoleh data melalui observasi, wawancara dan data hasil belajar, disebabkan kurangnya pemahaman materi dalam proses pembelajaran. Dimana materi PPKn yang tercantum terlalu kompleks sehingga menjadikan siswa kesulitan memahami materi serta kurangnya aktifitas siswa dalam pembelajaran. Selain itu juga dikarenakan kurangnya keterampilan guru dalam melakukan inovasi pembelajaran. Sehingga berdampak pada kurangnya motivasi dan keaktifan siswa dalam pembelajaran PPKn khususnya tema 4 materi Pancasila. Dalam praktek pembelajarannya, beberapa guru sudah pernah melakukan inovasi pembelajaran yang sederhana, melakukan pembelajaran berbasis kelompok semacam model STAD. Namun dalam pelaksanaannya masih

mengalami kendala seperti kurang menimbulkan semangat siswa untuk lebih tertantang aktif dalam pembelajaran. Sehingga pembelajaran dirasa kurang optimal untuk menjembatani kesulitan siswa.

Permasalahan yang muncul dalam pembelajaran PPKn ini perlu diadakannya inovasi sebagai perbaikan mencapai tujuan pembelajaran. Dengan cara menginovasi guru menggunakan model pembelajaran. Model yang rasa sesuai yaitu *Jigsaw* dan STAD.

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu diberikannya perbaikan untuk menginovasi guru dalam pembelajaran. Model pembelajaran yang dipilih dan diterapkan dalam pembelajaran PPKn yaitu model pembelajaran kooperatif, tipe *Jigsaw* adalah suatu teknik pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan materi tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya. *Jigsaw* didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain (Fathurrohman 2015:63).

Model pembelajaran mengkombinasikan keunggulan pembelajaran kooperatif dan pembelajaran individual. Ciri khas pada pembelajaran adalah setiap siswa secara individual dibawa ke kelompok-kelompok untuk didiskusikan dan saling dibahas oleh anggota kelompok, dan semua anggota kelompok bertanggungjawab atas semua jawaban (Fathurrohman 2015:75). Model pembelajaran STAD merupakan salah satu strategi pembelajaran kooperatif yang didalamnya beberapa kelompok kecil siswa dengan level kemampuan akademik



yang berbeda-beda saling bekerja sama untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran (Huda 2015:201). Model pembelajaran *Jigsaw* dan STAD merupakan model yang sesuai untuk diberikan kepada siswa SD sebagai upaya perbaikan dalam pembelajaran PPKn. Melalui model pembelajaran tersebut, Pembelajaran PPKn menjadi pembelajaran bermakna bagi siswa dan meningkatkan hasil belajar secara maksimal.

Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan masing-masing. Menurut Slavin (2015:190-191) model memiliki keunggulan sebagai berikut: 1) dapat meminilisasi keterkaitan guru dalam pemeriksaan dan pengelolaan rutin; 2) guru setidaknya akan menghabiskan sebagian dari waktunya untuk mengajar kelompok-kelompok ; 3) operasional program tersebut akan sedemikian sederhana sehingga para siswa di kelas tiga k eatas dapat melakukannya; 4) para siswa akan termotivasi untuk mempelajari materi-materi yang dipelajari dengan cepat dan akurat; 5) para siswa dapat melakukan pengecekan satu sama lain; 6) programnya mudah dipelajari baik oleh guru maupun siswa, tidak mahal, fleksibel; 7) dengan membuat para siswa bekerja secara kelompok kooperatif, program ini akan membangun kondisi untuk terbentuknya sikap positif secara akademik. Begitu juga model pembelajaran STAD. Model pembelajaran STAD memiliki kelebihan, sebagai berikut (Shoimin 2014:189) : 1) siswa bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi norma-norma kelompok; 2) siswa aktif membantu dan memotivasi samangat untuk berhasil bersama; 3) aktif berperan sebagai tutor sebaya untuk lebih meningkatkan keberhasilan kelompok; 4) interaksi antar siswa seiring dengan peningkatan kemampuan meraka dalam

berpendapat. Meningkatkan kecakapan individu dan kelompok dan tidak bersifat kompetitif.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, dengan penerapan pembelajaran kooperatif dianggap sangat penting, khususnya sebagai perbaikan proses pembelajaran. Melalui inovasi penerapan model *Jigsaw* dan STAD ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan dalam pembelajaran PPKn serta tercapainya tujuan pembelajaran. Pembelajaran siswa aktif dapat memaksimalkan pencapaian hasil belajar siswa itu sendiri.

Keefektifan antara model *Jigsaw* dan STAD ini belum dibuktikan kebenarannya, maka peneliti ingin menguji dengan melakukan penelitian eksperimen dengan judul "Pengaruh Model Pembelajaran *Jigsaw* dan STAD dalam Pembelajaran PPKn ."

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keefektifan model pembelajaran *Jigsaw* dalam pembelajaran PPKn ?
2. Bagaimanakah keefektifan model pembelajaran STAD dalam pembelajaran PPKn ?
3. Adakah perbedaan model pembelajaran *Jigsaw* dengan model pembelajaran STAD terhadap hasil belajar PPKn ?



### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran *Jigsaw* dalam pembelajaran PPKn.
- 2 Untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran STAD dalam pembelajaran PPKn.
- 3 Untuk mengetahui perbedaan model pembelajaran *Jigsaw* dengan model pembelajaran STAD terhadap hasil belajar PPKn.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak baik secara teoretis maupun praktis.

#### 1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penerapan model pembelajaran *Jigsaw* dan model pembelajaran STAD dapat menjadi inovasi dalam pembelajaran PPKn . Model pembelajaran *Jigsaw* dan model pembelajaran STAD dapat menjadi pendukung teori untuk penelitian selanjutnya. Dapat menjadi sumber referensi baru tentang inovasi penerapan model pembelajaran di sekolah dasar.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

##### a) Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini memberikan manfaat dapat menambah pengetahuan, serta keterampilan bagi peneliti untuk dapat menerapkan model pembelajaran

*Jigsaw* dan STAD dalam pembelajaran PPKn di Kelas IV SDN kecamatan Mejobo Kudus.

b) Bagi Guru

Penelitian ini memberikan manfaat kepada guru sekolah dasar dapat menambah wawasan dalam menguasai variasi model pembelajaran *Jigsaw* dan STAD, sehingga guru dapat menerapkan model pembelajaran tersebut untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta meningkatkan hasil belajar PPKn siswa secara optimal.

c) Bagi Siswa

Manfaat bagi siswa dalam penelitian ini dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam belajar. Memberikan pengalaman belajar bermakna bagi siswa. Meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, dan meningkatkan kerjasama rekan belajar.

d) Bagi Sekolah

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi dan masukan bagi pihak sekolah untuk selalu melaksanakan pembelajaran yang berkualitas dengan memaksimalkan sikap profesional guru untuk melakukan pembelajaran yang efektif di sekolah, dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pelaksanaan pembelajaran.